



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
MENERIMA AUDIENSI
ORMAS DPP PEMBELA TANAH AIR INDONESIA BERSATU (DPP PEKAT)
SELASA 9 JUNI 2020**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Audiensi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 9 Juni 2020
Waktu	:	Pukul 15:00 – 16:00 WIB
Tempat	:	Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III Lt 3.
Acara	:	Menerima Audiensi Ormas DPP PEKAT
Pimpinan Pertemuan	:	M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Danis Maya, S.H. Kabag. Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Markoni Koto (Ketua Umum DPP PEKAT); Perwakilan Anggota dan Pengurus DPP PEKAT; Berikut daftar nama terlampir.

A. Pendahuluan

Pada hari Selasa, 9 Juni 2020 pukul 15:00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Ormas Dewan Pimpinan Pusat Pembela Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP PEKAT) yang bertempat di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III lantai 3.

B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. Ketua Umum DPP Pekat, Markoni Koto menjelaskan bahwa DPP PEKAT merupakan ormas yang memiliki jaringan di 34 provinsi di Indonesia.
2. Ketua Umum Pekat menyatakan bahwa Pekat adalah Ormas yang memiliki komitmen dan kecintaan pada tanah air Indonesia. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Pekat memiliki misi kemandirian dengan menjadikan Pekat sebagai organisasi yang produktif. Salah satunya, dalam waktu dekat ini Pekat akan membuat produk berupa air minum kemasan yang akan dipasarkan ke masyarakat.
3. Diharapkan ke depan, organisasi ini bisa merentangkan sayap bisnisnya, sehingga benar-benar bisa berdiri secara mandiri dan memberi kemaslahatan lebih luas kepada masyarakat Indonesia.

4. Ketua Bidang Infokom Pekat, Puguh K menyampaikan beberapa aspirasi kepada Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korpolkam, khususnya terkait RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang dibahas di Komisi I DPR RI.
5. Puguh menilai bahwa pembahasan RUU PDP seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuat payung hukum yang komprehensif dalam rangka menegakkan kedaulatan data nasional. Hal tersebut dinilai mendesak, mengingat masa depan kehidupan umat manusia akan banyak bergantung pada teknologi informasi dan Artificial intelligent (AI).
6. Untuk mendukung upaya tersebut, Puguh menyarankan di dalam RUU PDP untuk mengamankan dibentuknya infrastruktur teknologi informasi, seperti National Data Center (NDC) yang akan menjadi lumbung utama data nasional.
7. Perwakilan DPP PEKAT lebih jauh menyampaikan, bahwa NDC atau lumbung data nasional tersebut akan menjadi sumber primer informasi nasional yang bisa dimanfaatkan oleh semua elemen pemerintah sesuai kebutuhannya. Dengan adanya satu sumber data, publik tidak akan lagi dibingungkan dengan masalah validitas data akibat banyaknya kesimpangsiuran informasi.

C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memahami masukan dan keterangan yang diberikan DPP Pekat, khususnya terkait manajemen teknologi informasi nasional.
2. Terkait aspirasi yang disampaikan DPP Pekat, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta DPP Pekat untuk membuat surat yang dilengkapi dengan kajian untuk kemudian diteruskan kepada Komisi I DPR RI, sehingga dapat dimasukkan kedalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi.

Audiensi ditutup pukul 16:00 WIB.

**a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat**



DANIS MAYA, S.H.
NIP. 19741026 199903 1 004